

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KETERGANTUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI SELATAN

PUTRI AMANAH AL-AZHARI

A031191073



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KETERGANTUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

disusun dan diajukan oleh

PUTRI AMANAH AL-AZHARI

A031191073



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KETERGANTUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

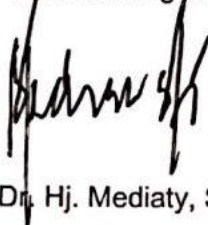
PUTRI AMANAH AL-AZHARI

A031191073

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 21 Juni 2024

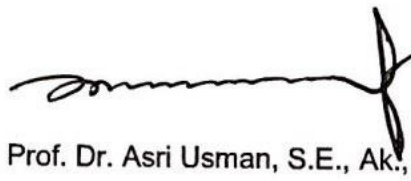
Pembimbing Utama



Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si.,
Ak., CA.

NIP: 19650925 199002 2 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Asri Usman, S.E., Ak.,
M.Si., CRA, CRP.

NIP: 19651018 199412 1 001

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasid, S.E., M.Si., Ak., ACPA

NIP: 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS TINGKAT KETERGANTUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI SELATAN

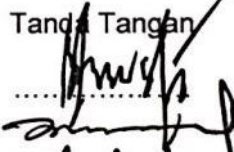
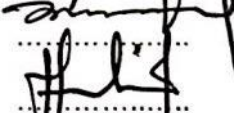
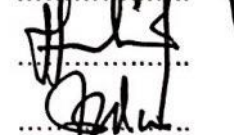

disusun dan diajukan oleh

PUTRI AMANAH AL-AZHARI

A031191073

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 4 Juli 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	
2.	Prof. Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CRA, CRP	Sekretaris	
3.	Prof. Dr. HJ. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	
4.	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA	Anggota	

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA

NIP: 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Putri Amanah Al-Azhari

NIM : A031191073

Departemen/Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul

ANALISIS TINGKAT KETERGANTUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI SELATAN

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 21 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Putri Amanah Al-Azhari

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul "Analisis Tingkat Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan". Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran, dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya karena masih memberikan kesehatan, kesempatan, kesabaran, dan ilmu serta kemudahan dalam menjalani proses perkuliahan dari awal hingga mendapatkan gelar sarjana.
2. Kedua orang tua tercinta Ibu Fausiah dan Bapak Tajuddin yang telah memberikan cinta, doa serta dukungan yang besar untuk penulis.
3. Bonda (Ernawaty) dan Mammi (Hj. Aminah) yang selalu memberikan cinta, doa dan dukungan yang tak terhingga untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik, serta menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis.

4. Saudara penulis Adik Nurlatifa dan Kakak Muh. Lukman sekeluarga yang telah menemani dan mendukung penulis selama ini.
5. Keluarga besar peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti selama menjalani proses perkuliahan.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I sekaligus pembimbing akademik penulis dan Bapak Prof. Dr. Asri Usman, S.E., Ak., M.Si., CRA, CRP selaku pembimbing II yang senantiasa memeberikan bimbingan, arahan dan saran kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Prof. Dr. HJ. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA selaku tim penguji atas saran dan masukan yang diberikan untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
9. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., dan Ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Asean CPA selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
10. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.
11. Seluruh staf dan karyawan Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Sahabat *Bismillaah* (Jasmin, Zulfitri, Rizky Indah, Aproditha serta Alm. Sitti Hadijah) yang selalu mendukung dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, menjadi tempat bertukar cerita suka dan duka serta menjadi teman seperjuangan penulis selama perkuliahan.

13. Sry Wahyuni dan Sukmawati Syukur selaku sahabat penulis sejak duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan yang selalu menjadi pendorong penulis untuk selalu melakukan hal – hal yang positif serta menjadi tempat bertukar cerita.
14. Ainul, Chika, Nova, Rima, Dilah dan Angel selaku teman seperjuangan penulis selama perkuliahan.
15. Teman – teman 19NITE yang senantiasa kebersamai selama perkuliahan dan menjadi teman penulis dalam menempuh ilmu pengetahuan.
16. Sahabat *Bestai* (Nurul, Kak Iis, dan Kak Ais) yang selalu menemani dan menghibur penulis dikala suka dan duka.
17. Rekan – rekan Surya Mas Indobaja khususnya Kak Iis, Kak Alia, Kak Ayuni dan Kak Hajar yang selalu menemani penulis selama bekerja dan memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman – teman KKN Pulau Salebbo dan Pulau Samatellu serta warga Pulau Salebbo khususnya Ummi Suhe yang telah menjadi keluarga kedua bagi penulis selama KKN berlangsung.
19. Meera dan Suhail yang selalu memberikan keceriaan bagi penulis.
20. Do Kyungsoo selaku idola penulis yang selalu memberikan energi positif kepada penulis sehingga penulis merasa bersemangat untuk mengerjakan skripsi ini.
21. Aditya Erisetiawan Dedy yang selalu mendukung, memberikan motivasi, memberikan waktu dan tenaga yang tak terhingga kepada penulis serta menjadi tempat berkeluh kesah dan partner terbaik bagi penulis.
22. Seluruh pihak yang tidak dapat dicantumkan satu persatu yang selalu membantu, mendukung dan menyemangati penulis selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik lagi dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 21 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Putri Amanah Al-Azhari', written in a cursive style.

Putri Amanah Al-Azhari

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KETERGANTUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN EFEKTIVITAS KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI SELATAN

ANALYSIS OF THE LEVEL OF REGIONAL GOVERNMENT FINANCIAL DEPENDENCE AND REGIONAL FINANCIAL EFFECTIVENESS IN DISTRICTS/CITIES IN SOUTH SULAWESI

Putri Amanah Al-Azhari
Mediaty
Asri Usman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah dan efektivitas keuangan daerah dengan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan analisis rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yakni membandingkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sumbangan dan Bantuan dengan Total Penerimaan Daerah serta menggunakan analisis rasio Efektivitas Keuangan dengan membandingkan realiasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang telah dianggarkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel yakni 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan pada periode 2018 – 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah Sulawesi Selatan terhadap pemerintah pusat masih tinggi, serta indikator efektivitas keuangan pemerintah daerah Sulawesi Selatan ialah efektif.

Kata Kunci: Tingkat Ketergantungan Keuangan, Pemerintah Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Keuangan.

This study aims to determine the level of regional government financial dependence and the effectiveness of regional finances by measuring the financial performance of regional governments using the Degree of Fiscal Decentralization ratio analysis, namely comparing Regional Original Income, Profit Sharing Funds, Donations and Assistance with Total Regional Revenue and using Financial Effectiveness ratio analysis with compare the realization of Original Regional Income and Original Regional Income that has been budgeted. This study uses a quantitative descriptive method with a sample size of 24 districts/cities in South Sulawesi in the period 2018 - 2022. The results of this study show that the level of financial dependence of the South Sulawesi regional government on the central government is still high, as well as indicators of the financial effectiveness of the Sulawesi regional government South is effective.

Keywords: Level of Financial Dependency, Regional Government, Degree of Fiscal Decentralization, Financial Effectiveness

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis	8
1.4.2. Kegunaan Praktis	8
1.5. Sitematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.....	10
2.1.2. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.....	13
2.1.3. Tingkat Ketergantungan Keuangan	15
2.1.4. Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah	17
2.2. Penelitian Terdahulu.....	17
2.3. Kerangka Penelitian	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1. Rancangan Penelitian.....	21
3.2. Tempat dan Waktu	21
3.3. Populasi dan Sampel.....	21
3.4. Jenis dan Sumber Data	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.6. Definisi Operasional.....	23
3.6.1. Tingkat Ketergantungan Keuangan	23
3.6.2. Derajat Desentralisasi Fiskal	23
3.6.3. Efektivitas Keuangan Daerah	25
3.6.4. Pendapatan Asli Daerah.....	26
3.6.5. Dana Bagi Hasil.....	27
3.6.6. Sumbangan dan Bantuan	28
3.7. Instrumen Penelitian	28
3.8. Analisis Data	29
3.8.1. Analisis Deskriptif Kuantitatif.....	29
3.8.2. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	29
3.8.3. Analisis Rasio Efektivitas Keuangan.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
4.2. Hasil Penelitian.....	34
4.2.1. Analisis Deskriptif Kuantitatif.....	34
4.2.2. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	37
4.2.3 Analisis Rasio Efektivitas Keuangan.....	43
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	45
4.3.1 Tingkat Ketergantungan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Masih Tinggi	45

4.3.2 Tingkat Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan	48
BAB V PENUTUP	50
5.1. Kesimpulan.....	50
5.2. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	56

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan.....	22
Tabel 3. 2 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	31
Tabel 3. 3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	31
Tabel 3. 4 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah.....	33
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Deskriptif Kuantitatif	35
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Rasio PAD terhadap TPD	38
Tabel 4. 3 Hasil Analisis Rasio DBH terhadap TPD	40
Tabel 4. 4 Hasil Analisis Rasio SB terhadap TPD.....	41
Tabel 4. 5 Hasil Analisis Rasio Efektivitas Keuangan	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Komposisi Pendapatan APBD (2017-2021).....	5
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	20
Gambar 4. 1 Derajat Desentralisasi Fiskal Sulawesi Selatan.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang terjadi pada awal tahun 1996 dan 1997 di Indonesia telah menciptakan pendelegasian sebagian kekuasaan untuk pemerintah daerah dari pemerintah pusat mengenai pengelolaan keuangan, dengan harapan pemerintah daerah dapat menangani pembangunan dan pelayanan secara mandiri. Setiap daerah diberikan hak untuk membentuk peraturan daerah, merencanakan, mengendalikan dan menjalankan kebijakan serta keuangan daerahnya sendiri (Sujarweni, 2015:231)

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang No 23 Tahun 2014)

Made Suwandi (2002) menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, monitoring dan evaluasi, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalisasi regional (lintas Kabupaten/Kota) dan eksternalitas lokal (dalam satu Kabupaten/Kota).

Pemerintah Daerah telah diberi kebebasan untuk mengatur, mengurus, dan mengelola rumah tangga daerahnya masing-masing, ini adalah salah satu asas dalam pembangunan daerah yang disebut dengan desentralisasi. Pada tahun 2001 desentralisasi fiskal atau otonomi daerah mulai dilaksanakan, hal ini ditandai dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan UU No 25 Tahun 1999 tentang “Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD)” yang sekarang digantikan dengan UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 33 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

Ketentuan Umum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi ini ialah berlakunya otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah ialah untuk memberikan layanan pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga memicu pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan yang diberikan ke masyarakat di daerah (Rusmin *et al*, 2014).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan pra syarat dalam sistem pemerintah daerah (Bratakusumah dan Solihin, 2001:169).

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi ditentukan oleh beberapa hal antara lain; 1) *Degree of dependency*, yaitu tingkat ketergantungan daerah kepada

pemerintah pusat rendah, baik dalam hal perencanaan maupun dalam penyediaan keuangan. 2) *Growth from inside*, yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Dan 3) Kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat ketimpangan dan kemiskinan di daerahnya (Poque T.F. dan L.G.Sgontz, 1978).

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah mampu melakukan otonomi adalah 1) Memiliki kemampuan keuangan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat sudah seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah.

Untuk mengukur keberhasilan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangannya dapat dilihat dari bagaimana daerah dapat merealisasikan PAD yang dianggarkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim 2002).

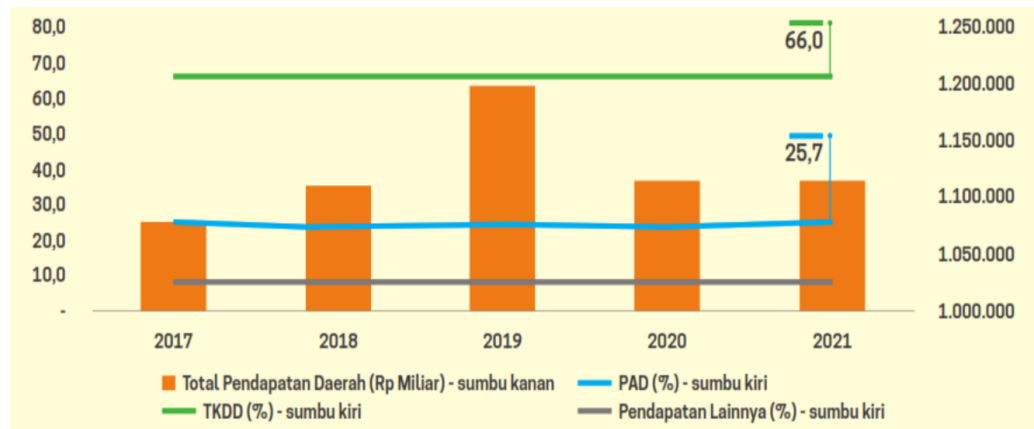
Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Hal ini disebut dengan desentralisasi fiskal, ini adalah salah satu program kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Kewenangan ini dilaksanakan baik pada dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah, maupun dana yang berasal dari pusat dalam hal ini mencakup dana bagi hasil pajak dan dana perimbangan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011 terdapat enam fungsi APBD, salah satunya adalah fungsi alokasi yang di mana anggaran pemerintah daerah harus digunakan untuk membuat lapangan pekerjaan atau mengurangi pengangguran, mengurangi pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fenomena yang terjadi saat ini justru banyak pemerintah daerah yang masih bergantung pada pemerintah pusat. Ketergantungan ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Selama ini pemerintah daerah memiliki keterbatasan pembiayaan dari potensinya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen pembiayaan terbesar selama ini berasal dari dana transfer dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan hanya sebagian kecil dari PAD itu sendiri, potensi pembiayaan lain yang belum dikelola yaitu dari pinjaman daerah (Santoso, 2003:148).

Dilansir dari Hedys (2022), disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat 443 pemerintah daerah atau 88,07% dari total 503 pemerintah daerah di Indonesia masih dikategorikan belum mandiri dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). BPK juga menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 468 pemerintah daerah atau 93,4% dari total pemerintah daerah di Indonesia yang masih berstatus pengelolaan keuangan yang sama dari tahun 2013 sampai 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dalam kurun waktu 7 tahun terakhir.

Gambar 1. 1 Komposisi Pendapatan APBD (2017-2021)



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan dalam White Paper Dataesia 2022

Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan di atas menggambarkan tingginya tingkat ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat, dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah hanya 25,7% pada 2021 yang menggambarkan tingkat kemandirian kabupaten/kota di Indonesia termasuk dalam kategori “Rendah” dengan rasio 25%-50%, sehingga mendekati kategori “Sangat Rendah” dengan rasio 0%-25%. Rata-rata dari 509 kabupaten/kota masih bergantung pada pemasukan dana dari pemerintah pusat, yang porsinya sekitar 66,0% dari total penerimaan daerah.

Salah satu permasalahan yang dihadapi saat ini oleh pemerintah daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan adalah tingginya tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat, ini disebabkan oleh rendahnya penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menunjukkan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah masih rendah. Pada tahun 2020 saat covid-19 melanda Indonesia, pemerintah berhasil menekan dampak pandemi covid-19 dan memulihkan ekonomi secara positif di triwulan IV tahun 2020, hal ini memicu beberapa daerah di Sulsel optimis menaikkan target PAD dari Rp9,88 Triliun di

tahun 2020 menjadi Rp10,15 Triliun di tahun 2021. Akan tetapi hasil dari optimisme pemerintah daerah belum terlihat pada triwulan I 2021.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah secara total pada triwulan I tahun 2021 hanya mencapai 7,52% atau sebesar Rp763,76 Miliar dari total pagu Rp10,156 Triliun, Realisasi tersebut mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada triwulan I tahun 2020 yang mencapai 15,32% atau sebesar Rp1,52 Triliun dari total pagu Rp9,8 Triliun. Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara total masih sangat rendah, dimana PAD hanya mencapai rasio 22,67% dari total pendapatan. Sementara porsi pendapatan transfer masih mendominasi hingga 73,88% dari total pendapatan.

Dilihat dari laporan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2023 pada portal Bank Indonesia, kemandirian fiskal Sulawesi Selatan hingga triwulan II 2023 sedikit menurun dibandingkan periode yang sama pada 2022. Hal ini tercermin pada rasio jumlah PAD seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 24 Kabupaten/Kota) terhadap total pendapatannya yang menurun, dari 26,10% menjadi 25,66%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fattah S (2012) yang menyatakan bahwa kinerja/kemampuan keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan masih sangat kurang yaitu sekitar 6,78% sampai 8,62%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan terhadap Pemerintah Pusat pada era otonomi daerah masih tinggi yaitu berkisar antara 85,27% sampai 93,22%.

Pernyataan sebelumnya juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhmad, A., dkk (2020) yang menyatakan bahwa pada tahun 2018 rasio kemandirian daerah tingkat II seluruh Indonesia adalah 15,50%, sementara rasio

kemandirian keuangan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata hanya 12,02%. Dengan demikian ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan relatif besar terhadap sumber dana dari pemerintah pusat. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muchran, M. dkk (2021) mengenai tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan selama tahun anggaran 2014-2018 yang tergolong efektif dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%.

Beberapa hal yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada periode tahun anggaran yang dipilih yaitu tahun anggaran 2018-2022 sebagai sampel penelitian dan penambahan analisis rasio efektivitas. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Analisis Tingkat Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu bagaimakah tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah dan efektivitas keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah dan efektivitas keuangan daerah pada Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan mengemukakan kegunaannya sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap pihak akademis dan pembaca yang dapat memanfaatkan penelitian ini.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pihak pemerintah dalam menyusun anggaran tahunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

1.5. Sitematika Penulisan

Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan yang berurutan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan definisi operasional, instrumen penelitian, analisis data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis deskriptif kuantitatif dan pembahasan hasil penelitian

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian dijabarkan dalam landasan teori. Landasan teoritis ini juga dapat digunakan untuk membuat solusi sementara untuk perumusan masalah yang diajukan dan untuk membantu dalam menyusun instrumen penelitian.

2.1.1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Istilah otonomi berasal dari baha Yunani, yaitu *outus* yang berarti sendiri dan *nomos* berarti undang-undang. Otonomi daerah di Indonesia dimulai saat berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah itu kedua Undang-Undang tersebut direvisi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 5

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggungjawab untuk mengelola sumber-sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas dan potensi daerah sendiri (Mediaty, 2013). Menurut Kuncoro (2004) beberapa hal yang dapat menghambat keberhasilan pemerintah daerah melaksanakan otonomi, yaitu:

- 1) Dominannya transfer dari pusat,
- 2) Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD),
- 3) Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan,
- 4) Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan
- 5) Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Otonomi daerah membuat perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten atau kota serta provinsi di Indonesia. Sebelum diterapkannya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang terbatas, namun setelah diterapkan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar pada segala bidang kecuali pertahanan, moneter, peradilan, agama dan politik luar negeri (Direktorat Otonomi Daerah, 2010 dalam Sijabat, M. Y, 2014).

Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk dalam hal penyusunan program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan ke daerah (Kharisma, 2013). Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih demokratis (Sidik, 2002).

Menurut Ketentuan Umum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) (Sidik, 2002). Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun'an dan Senuk, 2017 dalam Christian dan Ispriyarso, 2019).

Menurut (Christian dan Ispriyarso, 2019) Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sama seperti otonomi daerah, desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam provinsi-provinsi kemudian dibagi lagi ke dalam wilayah kabupaten dan kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan.

Keuangan daerah merupakan sumber daya yang dominan dalam menopang kemampuan otonomi daerah. Hampir tidak ada satupun kegiatan pemerintah di daerah yang tidak memerlukan biaya. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah merupakan satu variabel yang penting dalam kerangka

pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan di daerah pada umumnya (Savitry dkk, 2011)

Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar-kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah (Kuncoro 2007 dalam Savitry dkk, 2011)

2.1.2. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Menurut Sidik (2004) dalam Taaha (2011), Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ataupun otonomi daerah.

Sesuai dengan UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Menurut Ketentuan Umum UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan. Hal ini berarti bahwa hubungan

keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan yang baik sehingga kebutuhan pengeluaran akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Sejalan dengan pembagian kewenangan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan atas dasar asas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah atas dasar asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai Dana Perimbangan. Sumber-sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka desentralisasi fiskal meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan Pinjaman Daerah.

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) (Sidik, 2004 dalam Taaha 2011).
- 3) Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan

didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi ini adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia (Kuncoro, 2004)

- 4) Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

2.1.3. Tingkat Ketergantungan Keuangan

Tingkat ketergantungan daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Permasalahan yang sering dijumpai terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah mampu mengatasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hal ketergantungan fiskal untuk kebutuhan semua kegiatan pembangunan daerah (Kuncoro, 2004).

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah dapat dilihat dari banyaknya dana perimbangan yang diserahkan oleh pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) pemberian dana perimbangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah risiko dari penyerahan

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat secara rutin mentransfer dana bantuan pada daerah yang nantinya akan digunakan secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat atau untuk kepentingan lainnya.

Untuk melihat ketergantungan fiskal pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur kinerja/kemampuan keuangan pemerintah daerah dan mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah khususnya pada bidang keuangan. Mengukur kinerja/kemampuan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (Musgrave & Musgrave, 1980). Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Maka dari itu Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya (Mediaty, 2013)

Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Satu hal yang penting yaitu peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak baru, tetapi diharapkan daerah memiliki tingkat kejelian yang tinggi dan kemampuan dalam melihat dan memanfaatkan sumber-sumber potensial yang dimiliki. Sebaliknya, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melihat dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan potensial yang ada dapat mengakibatkan rendahnya kemampuan keuangan daerah yang pada akhirnya akan menghambat kelancaran pelaksanaan otonomi daerah.

2.1.4. Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2004:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesely*). Efektivitas dalam Pemerintah Daerah dapat diartikan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti yang telah direncanakan (Abdul Halim 2004:74).

Efektivitas keuangan daerah otonom merupakan indikator keberhasilan daerah dalam merealisasikan PAD yang dianggarkan. Dengan mengukur rasio efektivitas keuangan daerah dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim 2002).

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Fattah, S (2012) menyimpulkan bahwa dari hasil analisis derajat desentralisasi fiskal menunjukkan kinerja/kemampuan keuangan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan masih sangat rendah yaitu sekitar 6,78% sampai 8,62% dan dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan terhadap Pemerintah Pusat pada era otonomi daerah masih tinggi yaitu berkisar antara 85,27% sampai 93,22%.

Penelitian Suseno, D. A. (2013) mengenai efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah pasca diterapkannya desentralisasi fiskal mengatakan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2002-2010 masuk dalam kategori sangat efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai rasio efektivitas keuangan daerah lebih besar dari 100% kecuali pada tahun 2007 yakni sebesar 97,71% dengan kategori efektif.

Berdasarkan penelitian Sijabat, M. Y. (2014) mengenai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang pada tahun tahun 2008-2012 mendapatkan hasil bahwa kemampuan keuangan PAD Kota Malang termasuk dalam kategori kurang. Hal ini dikarenakan rata-rata kemampuan PAD Kota Malang masih dalam persentase derajat otonomi fiskal daerah berkisar antara 11,48% hingga 16,94% dengan rata-rata DOF selama lima tahun sebesar 13,67%.

Penelitian yang dilakukan Trianto, A. (2016) tentang analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kota Palembang menyimpulkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah Kota Palembang periode tahun 2003-2013 mencapai tingkat yang efektif yaitu 93,2%. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Palembang telah berhasil dalam merealisasikan PAD dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah daerah untuk menunjang Pembangunan di Kota Palembang.

Wibisono, N., & Yuliana, L. (2017) melakukan penelitian terkait tingkat ketergantungan kabupaten/kota se-jawa timur yang mendapatkan hasil penelitian bahwa pemerintah daerah di kabupaten/kota se-Jawa Timur masih bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan struktur penerimaan APBD yang masih didominasi oleh sumbangan dan bantuan dari pusat. Porsi bantuan pemerintah pusat rata-rata pada tahun 2008-2010 terbesar yaitu sebesar 3,02% pada tahun 2009, sedangkan yang memiliki proporsi terkecil bantuan pemerintah

pusat rata-rata yaitu sebesar 1,24% pada tahun 2010. Sedangkan pos Bagi Hasil dan Bukan Pajak (BHPBP) pada tahun 2008-2010 terbesar 2,62% pada tahun 2009, dan yang terkecil ialah 0,46% pada tahun 2008. Berdasarkan rendahnya proporsi BHPBP dibandingkan proporsi sumbangan dan bantuan daerah seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur terhadap total penerimaan daerah menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan seluruh kabupaten/kota se-Jawa Timur terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Pada tahun 2019 Prakoso, dkk melakukan penelitian terhadap kemampuan dan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan menarik kesimpulan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009-2013 termasuk kedalam kondisi kemampuan keuangan yang sangat kurang. Hal ini dikarenakan otonomi daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tidak diterapkan dengan baik, sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan rasio kemampuan keuangan yang diukur melalui derajat desentralisasi fiskal terdapat tiga kota dan 12 kabupaten yang termasuk dalam kategori kurang dan 17 kabupaten berada dalam kategori sangat kurang.

Akhmad, A., Romadhoni, B., & Diana, F. (2020) menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan relatif kecil. Dikarenakan rasio kemandirian keuangan yang dalam hal ini rasio pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah relatif kecil yaitu hanya rata-rata 10,97% dalam lima tahun terakhir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan relatif besar terhadap sumber dana pemerintah pusat.

Berdasarkan penelitian Muchran, M. dkk (2021) mengenai analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah

kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu selama tahun anggaran 2012-2018 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%

2.3. Kerangka Penelitian

Berdasarkan analisis dalam landasan teori dan penelitian terdahulu yang menguji analisis tingkat ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, maka dapat digambarkan suatu kerangka penelitian sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

